DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL & JURNAL

Afif, Z., Azhari, D. S., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Ilmiah (Kuantitatif) Beserta Paradigma, Pendekatan, Asumsi Dasar, Karakteristik, Metode Analisis Data Dan Outputnya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *3*(3), 682-693.

Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *12*(6), 2226-2236.

Alif, M., Irwan, A., & Saharuddin, A. (2023). Pengaruh Pelatihan dan Pengalaman Kerja Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Journal of Applied Management and Business Research (JAMBiR), 3(3).

Amalia, E., & Supriatna, Y. (2017). Perancangan sistem informasi administrasi kependudukan sebagai pengembangan egovernment. In *Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi* (Vol. 2, No. 1).

Ashiddiqy, A. F. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar. *Jurnal of Laws, Society and Islamic Civilizatation*, *9*(2).

Aulia, S. R., Putri, D. S., Azizah, A. K., & Mulyadi, P. F. (2025). Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Keputusan Administratif yang Merugikan Masyarakat: Antara Unsur Maladministrasi dan Perdata. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, *4*(1), 54-67.

Ayuniar, S., & Ridwan, R. (2023). Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penerbitan Akta Kelahiran. *Lex LATA*.

Azizah, A. (2017). Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling naratif. *Jurnal BK Unesa*, *7*(2).

Benu, V. M., Mauritsius, D., & Pello, H. F. (2025). TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO/96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI PENGADILAN NEGERI ATAMBUA. *Petitum Law Journal*, *2*(2), 520-535.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, *7*(1), 20-33.

Hadijah, A., Puspita, R., & Syafril, R. (2024). Peranan dan Fungsii Ombudsman Ri Perwakilan Sumatera Barat dalam Mencegah Maladministrasi. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, *1*(6), 141-148.

Hartadi, I., & Syaflan, M. (2021). IMPLEMENTASI PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BAGI PENGANTIN BARU "KAPERU" DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Wiya Wiwaha*, *1*(2).

Hartati, W., Wijaya, S. A., & Bahri, S. Y. (2024). Pertanggungjawaban hukum pejabat administrasi negara terhadap keputusan tata usaha negara yang dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, *1*(4), 193–200.

Haryanto, A. O. (2024). Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kota Bandung. *Imperium: Jurnal Kajian Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, *1*(1), 13-21.

Hidayat, E. S. (2019). Analisis implementasi kebijakan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *5*(4), 8-16.

Hidayat, R., Mayasari, R. E., Rahman, I., & Basrawi, B. (2025). PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT URGENSI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PERLINDUNGAN HAK WARGA DESA DI KECAMATAN WATUBANGGA. *Jurnal Abdimas Indonesia*, *5*(3), 1456-1463.

Jai, S. A., Setyawan, D., & Adiwidjaja, I. (2016). Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, *5*(1).

Jiwantara, F. A. (2019). Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi. *Jatiswara*, *34*(2), 131-142.

Kennedy, A., & Surya, W. H. (2024). *Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Good Governance di Indonesia*. *IURIS: Kajian Hukum*.

Kusumaningsih, R. (2025). Penguatan Kapasitas PTUN Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Melalui Electronic Government (E-Government) Sebagai Perwujudan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *3*(3), 385-398.

Labiba, N. A., & Herawati, N. R. (2021). Transformasi Administrasi Kependudukan Berbasis Online Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Penelitian Kartu Identitas Anak Kabupaten Jepara). *Journal of Politic and Government Studies*, *10*(4), 68-82.

Laharu, R. P., Warsono, H., & Astuti, R. S. (2025). Difusi Inovasi Aplikasi SI D'nOK Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, *13*(3), 272-293.

Matondang, M. R., & Sintara, D. (2023). TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM HUKUM PERDATA. *NERACA KEADILAN*, *2*(2), 188-196.

Maulana, D. F., Gusliana, H. B., & Zulwisman, Z. (2024). Pelaksanaan inovasi pencatatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota payakumbuh berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Studi Kasus di Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat). *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, *7*(1), 291-304.

Mezak, M. H. (2006). Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum.

Muhimah, U. U. (2022). Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *2*(1), 53-63.

Muhsin, M. S. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, *7*(3).

Nasution, D. M. A. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online. *RESAM Jurnal Hukum*, *4*(1), 17-30.

Ni'amillah, H., Herawati, A. R., & Afrizal, T. (2023). Analisis Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Menangani Laporan Maladministrasi Pelayanan Publik. *Journal of Public Policy and Management Review*, *12*(4), 549-562.

Oktaviangga, M. R., Sya'bani, M. I., Watusslikha, A. R., & Salamah, Y. (2024). Pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Siak) Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administratif Di Desa Wateswinangun. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493)*, *4*(03), 21-24.

Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Souvereignty*, *2*(2), 188-200.

Putri, S. N. R. A., & Simangunsong, F. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PENDUDUK NON PERMANEN YANG TIDAK MEMILIKI SKPNP DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, *2*(6), 611-616.

Rifqi, H., & Wijaya, M. (2025). Digitalisasi Layanan Kependudukan: Studi Kasus Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 283-290.

Riskiyah, S. P. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Sebagai Pengganti Akta Nikah Dalam Pembuatan Akta Kelahiran. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Sari, M. F., Mustamin, M., & Mamonto, M. A. W. W. (2025). Pengaturan Pemenuhan Hak Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah. *LEGAL DIALOGICA*, *1*(1), 146-163.

Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, *21*(3), 308-315.

Satria, I., Ainita, O., & Prayitno, A. (2021). Analisis Perubahan Dokumen Akta Kelahiran Yang Disebabkan kesalahan Pencatatan. *PALAR (Pakuan Law review)*, *7*(1), 181-190.

Sopian, R. M., Amalia, A., & Jainah, Z. O. (2024). PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PEMERINTAH AKIBAT TERJADINYA MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, *2*(10), 1348-1354.

Sufriadi. (2014). Tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Yuridis, 1*(1), 57–72.

Tuju, M. A. M., Kimbal, M., & Mantiri, M. (2017). Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (Suatu Studi Tentang Pelayanan Akta Kelahiran). *Jurnal Eksekutif*, *2*(2).

Wahyuningsih, R., Sudarmanto, K., & Soegianto, S. (2023). Maladministrasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. *Journal Juridisch*, *1*(2), 99-115.

Widiastuti, Ika. *Teori Administrasi Publik*. Malang: PT. Penerbit Riset Sadewa, 2025. ISBN 978-623-10-6395-3.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lampiran Format I C dan Format 2 C Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor 38 Lampiran Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Disdukcapil di seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 Tentang Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan

Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pemcatatan nama pada dokumen kependudukan

Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022.

Pasal 51 ayat 4 juncto Pasal 132 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor Nomor 96 Tahun 2018 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019

Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 pada Lampiran Format 1 C dan Format 2 C.

Surat Dirjen Dukcapil No. 472/9670/Dukcapil tanggal 19 Desember 2019 kepada Kadis Dukcapil Kab. Lebong.

Surat Dirjen Dukcapil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia Nomor 470/13287/Dukcapil tanggal 28 September 2021 hal Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

WEBSITE

https://www.antaranews.com/berita/4072593/dirjen-dukcapil-tegaskan-pelayanan-adminduk-tanpa-dipungut-biaya (Diakses pada tanggal 6 Desember 2025)

https://www.cermati.com/artikel/cara-memperbaiki-ktp-yang-salah-data (Diakses pada tanggal 6 Desember 2025)

https://www.detik.com/jatim/berita/d-5909489/penyebab-seorang-warga-di-magetan-dapat-akta-kematian-meski-masih-hidup (Diakses pada 13 Oktober 2025)

WAWANCARA

Benny Danang Kurniawan, Administrator Data Base Kependudukan, Wawancara Pribadi, Boyolali, 23 Desember 2025, pukul 08:00 WIB.

Fiqri Nuralia Qodri, Administrator Data Base Kependudukan, Wawancara Pribadi, Boyolali, 23 Desember 2025, pukul 08:00 WIB.

Septiana Vonny Nurlita, Penelaah Teknis Kebijakan, Wawancara Pribadi, Boyolali, 23 Desember 2025, pukul 08:00 WIB.